



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6779-6790

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011

Feby Florenza Br Sembiring^{1✉}, Ramsul Nababan²

Universitas Negeri Medan

Email: febyflorenza18@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, melalui analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), individu mana yang paling layak mendapatkan bantuan pemerintah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial. Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Data untuk penelitian kualitatif deskriptif ini berasal dari wawancara mendalam, observasi partisipan, dan catatan tertulis. Setelah data terkumpul, data dikaji dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hubungan antara bantuan sosial dan kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu alat utama yang digunakan untuk menyalurkan bantuan melalui data DTKS, yang berfungsi sebagai basis data penerima bantuan. DTKS menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Menerapkan data DTKS, kelurahan dapat memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran, yaitu kepada mereka yang paling membutuhkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas, khususnya kelompok rentan dan miskin, sangat meningkat berkat bantuan sosial yang diberikan kelurahan.

Kata Kunci: *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial, Kesejahteraan*

Abstract

The main objective of this study is to identify, through the analysis of Integrated Social Welfare Data (DTKS), which individuals are most deserving of government assistance, with the hope of contributing to the economic welfare of the community through the distribution of social assistance. To find out how the poor are handled based on Law Number 13 of 2011, this study uses a normative-empirical legal approach. Data for this descriptive qualitative study came from in-depth interviews, participant observation, and written notes. After the data was collected, the data was reviewed by reducing, presenting, and drawing conclusions. The results of the study show that the relationship between social assistance and economic welfare has an important relationship in efforts to improve the economic welfare of the community, especially for the underprivileged. One of the main tools used to distribute assistance is through DTKS data, which functions as a database of aid recipients. DTKS is an important instrument used by the government to distribute social assistance to people in need, in accordance with Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor. By utilizing DTKS data, sub-districts can ensure that social assistance is given to those who really need it. The economic welfare of the community, especially vulnerable and poor groups, has increased greatly thanks to the social assistance provided by the sub-district.

Keywords: *Integrated Social Welfare Data, Social Assistance, Welfare*

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara-negara yang standar hidup penduduknya secara umum masih jauh di bawah standar hidup negara-negara industri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara berkembang secara keseluruhan masih menghadapi masalah keterbelakangan teknologi dan ekonomi di hampir setiap bidang. Akibatnya, kesejahteraan sosial suatu negara tidak dapat terwujud tanpa adanya sistem penanggulangan kemiskinan. Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain, merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab kemiskinan. Peningkatan bantuan bukanlah tujuan akhir dari rencana anggaran pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang terbatas, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap keberadaan kemiskinan. Pemerintah Indonesia, dengan komitmen kuatnya, berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu. Sejalan dengan ini, pendataan warga miskin dilakukan untuk memastikan akurasi DTKS. Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam mendata warga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, sehingga program bantuan sosial dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mencapai kesejahteraan hidup, diluncurkan suatu inisiatif pendataan bagi populasi miskin, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pembaruan data tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2011 yang pada dasarnya mengharuskan pemerintah kabupaten atau kota menetapkan pemutakhiran data sebagai prosedur hierarkis. Untuk melacak siapa saja penerima bantuan sosial dan apakah mereka memenuhi kriteria untuk itu, Dinas Sosial harus selalu memperbarui datanya. Hal ini dilakukan secara teknis melalui SIKS-NG (*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation*).

Dalam menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah memiliki tantangan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan efektif terdapat pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, yang mengatur penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang maupun sembako, memiliki tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Bantuan tersebut bisa disalurkan langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. (Peraturan Presiden RI No 63 Tahun, 2017).

Kelurahan, sebagai unit pemerintah terkecil, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang telah diserahkan oleh camat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur antara kecamatan dan kelurahan ini bersifat hirarkis, menciptakan sistem organisasi yang efektif dan efisien. Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dengan demikian, kelurahan memainkan peran penting dalam mempromosikan hasil pendidikan yang baik dalam masyarakat.

Sebagai integral dari Kota Medan, Kelurahan Simpang Selayang memperoleh manfaat dari bantuan sosial pemerintah pusat. Penyaluran efektif dari bantuan ini sangat bergantung pada kepemimpinan daerah, terutama Lurah, yang memegang peran kunci dalam memastikan tepat sarannya. Dalam upaya mencapai ini, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Lurah menjadi penting. Akurasi dalam menggunakan DTKS

krusial dalam menentukan penerima bantuan yang sesuai. Bantuan yang tepat sasaran ini diharapkan bisa berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peran Lurah sangat vital untuk memastikan bantuan sosial mencapai mereka yang paling membutuhkan.

Hubungan antara bantuan sosial dan kesejahteraan ekonomi sangat bergantung pada akurasi data dalam DTKS. Bantuan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, namun tantangan seperti kurangnya validasi data dan minimnya sosialisasi membuat proses penyaluran tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas data, sosialisasi yang lebih intensif, dan penyederhanaan prosedur dapat membantu memaksimalkan dampak positif dari bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang. Bantuan sosial memainkan peran krusial dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, khususnya di Kelurahan Simpang Selayang. Dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan, terdapat hubungan erat antara ketepatan sasaran bantuan dan kesejahteraan ekonomi warga penerima.

Dampak bantuan sosial berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, dengan adanya program bantuan sosial pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, tetapi tidak berarti dapat menghapuskan masalah kemiskinan di Indonesia hanya saja dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya bantuan sosial, masyarakat yang ekonominya rentan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Bantuan sosial membantu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Kelurahan Simpang Selayang merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kantor Kelurahan Simpang Selayang dikelilingi oleh rumah masyarakat yang sudah memiliki lingkungannya masing-masing dengan berbagai jenis kelamin, agama, dan tingkat pendidikan. Berikut data masyarakat kelurahan simpang selayang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	5161	10545
2	Perempuan	1453	10966
Jumlah			21511

Sumber: Sekretaris Kelurahan Simpang Selayang, 2023

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	9465
2	Kristen Protestan	9837
3	Katholik	2158
4	Hindu	14
5	Budha	37
6	Konghucu	0
Jumlah		21511

Sumber: Sekretaris Kelurahan Simpang Selayang, 2023

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Agama	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	5946
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1538
3	Tamat SD/Sederajat	1302
4	Tamat SLTP/Sederajat	1827
5	Tamat SLTA/Sederajat	6478
6	Tamat Diploma I/II	68
7	Akademik/Diploma/Sarjana Muda	932
8	Diplomaa IV/ Strata I	3075
9	Strata II	328
10	Starata III	22
Jumlah		21511

Sumber: Sekretaris Kelurahan Simpang Selayang, 2023

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dampaknya terhadap penyaluran Bantuan Sosial dalam meningkatkan

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan legislatif terhadap penelitian hukum normatif-empiris. Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum normatif-empiris sebagai penelitian yang mengkaji bagaimana fenomena kemasyarakatan dipengaruhi oleh hukum hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif-empiris ini adalah untuk mengetahui apakah hukum diterapkan dalam kejadian yang serupa (Muhaimin, 2020:115). Metode penelitian deskriptif kualitatif memaparkan atau menjelaskan informasi pada suatu fenomena yang lebih rinci dan penelitian deskriptif memiliki tujuan berupaya untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Studi ini diraih melalui proses pendalaman melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditunjuk oleh peneliti. (Morissan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Ekonomi berdasarkan DTKS di Kelurahan Simpang Selayang

Hubungan antara Bantuan sosial dan kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu alat utama yang digunakan untuk menyalurkan bantuan melalui data DTKS, yang berfungsi sebagai basis data penerima bantuan. DTKS menjadi instrumen penting Pemerintah telah mengimplementasikan mekanisme penyaluran bantuan sosial, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam rangka penanganan fakir miskin.

Di Kelurahan Simpang Selayang, Untuk memahami siapa yang berhak memperoleh bantuan sosial guna mendukung perekonomian lokal, kita memerlukan data DTKS. Dengan data tersebut, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kupon pangan dapat disalurkan dengan lebih akurat kepada mereka yang paling memerlukan dengan menggunakan data DTKS. Dengan informasi ini dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk membantu masyarakat di kelurahan ini hidup dalam kemiskinan yang lebih sedikit dan dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Namun, kesejahteraan ekonomi yang ditingkatkan melalui bantuan sosial sering kali bersifat sementara, karena bantuan ini hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar. Untuk

benar-benar mengangkat kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang, diperlukan program-program tambahan, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke peluang usaha kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah dan masyarakat Kelurahan Simpang Selayang, teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadi grand theory pada penelitian ini, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh warganya. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menjamin hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, tetapi juga bertindak aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menyediakan perlindungan bagi masyarakat yang rentan melalui berbagai program sosial.

Negara kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan oleh Esping-Andersen berfungsi untuk mengurangi risiko sosial dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyediakan bantuan sosial dan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial.

Dalam penelitian ini, teori negara kesejahteraan diaplikasikan pada analisis hubungan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Selayang. Negara, melalui program bantuan sosial berbasis DTKS seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), berperan aktif dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Teori ini memfokuskan pentingnya intervensi sosial yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tapi juga direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup dalam jangka panjang. Dengan demikian, program-program bantuan harus diintegrasikan dengan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi dan pendidikan agar masyarakat mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam konteks ini, peran DTKS sangat penting dalam menentukan penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan, sehingga bantuan dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran.

Pada intinya, teori negara kesejahteraan menegaskan peran penting negara, yang bukan hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Ini melibatkan perbaikan sistem pendataan, pemantauan dampak bantuan sosial, dan pengembangan program-program pendukung seperti pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan data DTKS terhadap kesejahteraan ekonomi di Kelurahan Simpang Selayang

Bantuan Sosial yang diberikan berdasarkan data DTKS memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kelurahan Simpang Selayang, terutama dalam memperbaiki kondisi finansial masyarakat miskin dan marginal. Program pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Simpang Selayang, dengan fokus pada distribusi bantuan sosial melalui Sistem Informasi Pajak Langsung (DTKS). Penerima bantuan sosial, termasuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), diidentifikasi melalui DTKS.

Salah satu dampak utama dari bantuan sosial yang disalurkan melalui DTKS adalah peningkatan daya beli masyarakat penerima bantuan. Bantuan dalam bentuk tunai atau pangan membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama makanan dan keperluan sehari-hari. Sebagai contoh, bantuan sembako dari program BPNT memungkinkan penerima untuk mengurangi pengeluaran mereka dalam membeli bahan pokok. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan sebagian penghasilan yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan dasar ke keperluan lain seperti biaya pendidikan anak-anak atau kebutuhan kesehatan.

Bantuan sosial juga berperan penting dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dialami keluarga miskin. Keluarga yang mendapatkan bantuan tunai dari Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan dari BPNT dapat terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran, terutama di tengah kenaikan harga barang pokok atau dalam situasi ekonomi yang sulit. Dengan adanya bantuan sosial, beban finansial keluarga berkurang sehingga mereka bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Meskipun bantuan sosial memberikan dukungan yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi, dampaknya sering kali bersifat sementara. Bantuan ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, pemberian akses modal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja.

Agar bantuan sosial dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain bantuan tunai dan pangan, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, keterampilan, dan akses kerja juga perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus terus memperbaiki sistem pendataan

dan penyaluran agar bantuan dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang yang menerima bantuan sosial juga merasa sedikit lebih stabil secara finansial, meskipun bantuan ini tidak mampu sepenuhnya menghapus kemiskinan. Bantuan sosial lebih banyak berperan sebagai alat untuk meringankan beban hidup sehari-hari, bukan sebagai solusi akhir dari kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan serta telah dibahas menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara Bantuan sosial dan kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu alat utama yang digunakan untuk menyalurkan bantuan melalui data DTKS, yang berfungsi sebagai basis data penerima bantuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, DTKS merupakan instrumen penting bagi negara untuk menyalurkan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan. Kelurahan dapat menggunakan data DTKS untuk mengidentifikasi secara tepat siapa saja yang membutuhkan bantuan sosial dan menyalurkannya kepada mereka. Ketepatan sasaran ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari program-program sosial yang ada. Ketika bantuan sosial diterima oleh keluarga yang layak, dampaknya terlihat pada kesejahteraan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Meskipun tidak secara langsung menghilangkan kemiskinan, bantuan sosial ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga yang rentan.
2. Dampak Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan data DTKS mengenai kesejahteraan ekonomi di Kelurahan Simpang Selayang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, khususnya bagi kelompok yang miskin dan terpinggirkan. Inisiatif pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Simpang Selayang sangatlah krusial. sebagian besar bertumpu pada program bantuan sosial yang diberikan berdasarkan Sistem Informasi Pajak Langsung (DTKS). Penerima manfaat program bantuan sosial, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), ditetapkan menggunakan DTKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Alba, Amru., and Rudi. Kurniawan. 2019. "Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin 'Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.'" *Unimal Press* 1:1-128.
- Alfiyah, Z.U. (2018) Konsep Keadilan John Rawls Dan Mutadha Muthahhari, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA* 10(1): 26-32.
- Djauhari. 2016. Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam. *Jurnal Hukum*, XVI(1), 27-38.
- ELVIANDRI, E. (2019) 'Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*,
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hasna, N.M., Nugraha, N. and Mustikarini, I.D. (2019) 'Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat', *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*,
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Juliana, B., Putri, E.R. and Karunia, N. (2023) 'Implementasi Sila Ke-5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat', *Indigenous Knowledge*
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK (2019) 'Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai jaminan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 38.22
- Manoppo, E.V. and Laoh, N.A. (2022) 'Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Konstituen Vol*, 4(1)

- Marsudi Dedi Putra (2021) 'Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila', *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*
- Muga, M.P.L., Kiak, N.T. and Maak, C.S. (2021) 'Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)', *Oeconomicus Journal of Economics*, 5(2)
- Muhaimin.. (2020). Metode Penelitian Hukum. Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Muhadjir Darwin, Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Nainggolan, T. (2019) 'Dinamika Psikologis Pemanfaatan Data Terpadu Dalam Penanganan Kemiskinan Di Deli Serdang Psychological Dynamics Using Integrated Data On Poverty Aleviation Abstrak Pendahuluan Secara sederhana , data adalah fakta yang diambil untuk kepentingan tertentu .', *Pusat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial*, 1 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial – Kementerian Sosial RI),
- PMK (2019) 'Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019', Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H. and Eko, D. (2016) *Teori Hukum Pancasila*.
- Rachman, C.I. (2023) 'Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Gøsta Esping-Andersen dengan Pancasila dalam Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia', *Jurnal Aktualisasi Pancasila*, 1(1), pp. 1–13. Available at: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jap/article/view/5841>.
- Rawls, John & Uzair Fauzan, Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2006, Teori Dan Kepemimpinan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Suriadi, Agus. 2005. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat
- Tiena Sulistryini, Sulistryarini. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponogoro Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponogoro Provinsi Jawa Timur, hal. 146.
- Wati, S. (2022) 'Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh', pp. 1–129.

Wau, M., Wati, L. and Fau, J.F. (2022) 'Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)', Eureka Media Aksara, pp. 1–73.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/Huk/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin'

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (2021)

Peraturan Presiden RI No 63 Tahun (2017) 'Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017, Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai', *Peraturan Presiden*, 87(1,2), pp. 149–200.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html>

<https://kemensos.go.id/ar/mensos-kewenangan-menambah-dan-menghapus-penerima-bansos-di-dtks-ada-pada-pemerintah-daerah>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5084740/indonesia-masuk-daftar-100-negara-paling-miskin-di-dunia> (diakses 25 November)